

# PANCASILA, “ISME-ISME”, DAN GERAKAN PENCERAHAN

Armada Riyanto

*Sekolah Tinggi Filsafat Widya Sasana, Malang*

---

## Pancasila dan “Isme-Isme”

Percakapan tentang “isme-isme” saat ini terasa hambar dan tidak ada rasanya. “Isme-isme” selalu memiliki bingkai pembicaraan tentang “ideologi”. Era saat ini – sejak runtuhnya Tembok Berlin – merupakan era kematian ideologis. Maksudnya, bila saat ini penguasa atau tiran mengusung “ideologi” (seperti komunisme atau yang bertentangan dengan itu), penguasa tersebut atau konsep kekuasaannya kerap diidentikkan dengan “absurditas” dan kegilaan. Dari sebab itu apabila kita ingin menelaah Pancasila dalam kaitannya dengan “isme-isme” kita harus selalu kembali ke kepada sejarah pemikiran.

Dalam filsafat “ideologi” berarti sebuah sistem “ide”, suatu “Weltanschauung” (Jerman), yang identik dengan rasionalitas itu sendiri. Dalam filosof Plato, terminologi “idea” dan “logos” memiliki makna yang mendalam. “Idea” bukanlah gambaran pengertian yang ada dalam akal budi. “Logos” juga bukan sebuah ilmu seperti layaknya ilmu fisika atau matematika. Ideologi mencakup keseluruhan dari apa yang disebut rasionalitas. Descartes memiliki konsep yang mengaitkan rasionalitas dengan kesadaran. Aku berpikir (rasionalitas) berarti aku menyadari. Artinya, berpikir itu bukan lain kecuali memiliki kesadaran akan realitas, akan dunia, akan hidupnya, akan eksistensi dirinya.

Baik Plato maupun Descartes memberikan inspirasi kepada Soekarno perihal konsep-konsep kesadaran batin, jiwa dari bangsa Indonesia. Rasionalitas Soekarnian berarti kesadaran akan realitas hidup bangsa, akan kedalaman kulturnya, dan akan eksistensi siapa diri bangsa ini. Jadi, dalam konteks ini Pancasila adalah rasionalitas bangsa ini. Jika memeluk yang “bukan-Pancasila”, ia menghidupi “irasionalitas” dan absurditas.

Terminologi “ideologi” mengalir dari bukan Karl Marx, melainkan sebelum itu yaitu dari para tokoh-tokoh teologis-sosial Perancis. Revolusi 1789 di Perancis bukanlah revolusi kekuasaan seperti yang kita bayangkan zaman ini. Melainkan, itu revolusi menyeluruh dari berbagai aspek sudut pandang manusia. Di antaranya, revolusi itu sekaligus memicu revolusi ilmu pengetahuan. Ketika “kekuasaan” monarkial dan eklesial (Gereja) runtuh, timbul persoalan “kebenaran” itu milik siapa? Ingat, tatkala kekuasaan politis gandeng dengan kekuasaan religius, “hak paten” kebenaran rasionalitas berada di tangan mereka. Bahkan juga apabila hal itu berkaitan dengan kebenaran ilmu pengetahuan. Simak bagaimana kekaisaran Tiongkok “bisa” berlangsung ratusan tahun. Halnya pada waktu itu, kekuasaan politik sekaligus episenter dari kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Yang jenis ini pernah terjadi satu dua kali di satu dua kerajaan kuno Indonesia.

Tokoh-tokoh sosial Perancis pasca revolusi menemukan metodologi-metodologi baru untuk menyimak perkembangan sosial masyarakat. Jurang antara si kaya dan miskin, kepemilikan modal, dan keadaan kerja para upahan membangkitkan dalam diri mereka kesadaran-kesadaran konseptual-rasional baru. Mengapa petani tidak pernah mengenyam hidup berkelimpahan, dan mengapa para buruh selalu miskin dan susah, adalah satu dua

pertanyaan yang tidak boleh dipandang sepele melainkan mengatakan suatu pergulatan filosofis yang memicu “perkembangan baru”. Karl Marx di antara adalah eksponen utama perkembangan baru tersebut yang mengkritisi keadaan tidak adil dari realitas keseharian hidup manusia ketika itu. Marx memvonis bahwa realitas hidup manusia susah semata-mata karena “kapitalisme”. Marx yakin bahwa “kapital” (dari “caput” bahasa Latin yang artinya kepala) bukanlah barang atau kekayaan atau benda mati. “Kapital” seolah sebuah “kepala” yang bisa berpikir dan mengembangkan diri sedemikian rupa. “Kapital” itu seakan memiliki karakter egois, ia mementingkan dirinya secara absolut, menggusur yang lemah, menindasnya, memerbudaknya, dan melenyapkannya. “Kapitalisme” lantas menjadi sebuah “sistem” yang difondasikan pada kapital.

Tentu saja ketika berbicara tentang “kapitalisme” kita tidak bicara tentang gula (misalnya) atau pabrik pembuatannya. Melainkan kita berbicara tentang “caput”-nya, pemiliknya, sistem yang mengatur proses produksinya, dan *the invisible hands* (terminologi Adam Smith) yang mengatur harga naik turun di pasar gula. Kapitalisme *a la* Adam Smith lah yang kerap diruju sebagai betapa kejam sistem pasar dari sebuah ekonomi. Sebab, bila berbicara tentang pasar, kita bicara tentang produksi yang laku (harga terjangkau), layak jual. Dan, bila berbicara tentang layak laku jual, kita berbicara tentang modal. Artinya, pemodal kecil akan tergusur oleh pemodal besar; dari sendirinya demikian karena pemodal besar akan dengan mudah “menaklukan” pasar dengan berbagai tawaran inovasi kualitas dan kuantitas sekaligus.

**“Globalization” in Adam Smith.** Adam Smith (1723-1790), filosof Skotlandia, bukanlah pencetus globalisasi. Tetapi, gagasannya yang dia rangkum dalam lima seri buku monumental berjudul *Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (terbit 17 Maret 1779) menggelindingkan konsep ekonomi pasar bebas dan kapitalisme yang menjadi cikal bakal ekonomi global. Konteks buku ini adalah periode Pencerahan yang sangat mendewakan ratio, akal budi, ilmu pengetahuan. Francis Bacon mendeklarasikan: *science is power*. Orang Eropa kerap mengasalkan *Western Culture* mengalir dari periode *Enlightenment*.

Judul panjang bukunya kerap diringkas sebagai *Wealth of Nations*, “kekayaan atau kemakmuran bangsa-bangsa”. Smith adalah pionir ilmu ekonomi modern. Dalam menggagas bagaimana agar relasi perdagangan antarbangsa dapat *saling memakmurkan*, ia keluar dari pakem yang ada pada waktu itu.

Pakem teori ekonomi kala itu disebut *mercantilism*, suatu teori ekonomi yang mengatakan bahwa kesejahteraan negara hanya menjadi mungkin kalau aset atau modal yang dimiliki cukup besar serta melakukan perdagangan yang menguntungkan. Aset ekonomi atau modal negara dapat digambarkan secara nyata dengan jumlah kapital (terutama emas maupun komoditas lainnya) yang dimiliki oleh negara dan modal ini bisa diperbesar jumlahnya dengan meningkatkan ekspor. Merkantilisme mengajarkan bahwa pemerintahan suatu negara harus mencapai tujuan ini dengan melakukan perlindungan terhadap perekonomiannya (proteksi), mendorong ekspor dan mengurangi impor.

Smith punya ide revolusioner pada zamannya. Menurutnya, perdagangan bebas yang dari sendirinya memiliki cara kerja persaingan akan memicu banyak kemajuan dan kemakmuran luar biasa bagi negara-negara. *Wealth of Nations* mempromosikan kebenaran bahwa pasar memiliki mekanisme yang secara natural akan memberi keuntungan kepada para pelakunya. Sebaliknya, setiap restriksi dan pengekan akan mengacaukan kodrat lalu lintas perdagangan. Smith mendasarkan teorinya pada konsep tentang manusia sebagai individu bebas yang memiliki interese (sekaligus di sisi gelapnya, ketamakan) dan rasionalitas.

Menurut Smith, yang kita tunggu-tunggu dalam mekanisme pasar *bukanlah* kebaikan para pelakunya (para pedagang), tetapi rasionalitas mereka dalam menggarap interesenya. Artinya,

bila kita ingin membeli sebuah barang, janganlah kita mengharapkan “kebaikan hati” si penjual untuk menurunkan harganya. Yang harus kita harapkan (dan setiap kali kita andaikan), si penjual memasang harga sedemikian rupa sehingga secara rasional memberi keuntungan yang sepadan baginya dan kita pun tidak dibuatnya rugi bila memutuskan untuk membelinya. Ungkapan yang sangat terkenal dari Smith tentang ini dari *Wealth of Nations* demikian:

It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker that we expect our dinner, but from their regard to their own interest. We address ourselves, not to their humanity but to their self-love, and never talk to them of our own necessities but of their advantages.<sup>1</sup>

Smith meyakini kebenaran bahwa mengenai *bagaimana* pedagang memasang harga sedemikian rupa, tidak ada ketentuan manusia atau institusi macam apa pun yang mampu mengatur atau mengengkangnya.<sup>2</sup> Sebab, bila harga yang mereka pasang terlalu tinggi, sudah pasti pasar akan merespon negatif. Barang tersebut terancam tidak laku. Dan, bila tidak laku, mereka pasti akan menyesuaikan harganya. Proses pasar di tangan para pelaku perdagangan semacam ini mendapat sebutan dalam bahasa Perancis, *laissez-faire*, yang berarti “biarkan [mereka] berbuat [menurut pertimbangannya]”.

Sebuah pasar yang kacau, menurut opini Smith, akan secara kodrati dipandu oleh “invisible hands”. Artinya, jika kelangkaan produk barang tertentu terjadi, misalnya, harga pasti naik, dan kenyataan itu akan membuat marjin keuntungan yang menjadi insentif daya dorong bagi yang lain untuk masuk ke produksi barang tersebut. Kelangkaan pun perlahan dapat diatasi. Tetapi, jika terlalu banyak produsen yang masuk ke pasar, kompetisi pasti meningkat dan kenaikan penawaran (karena kompetisi) akan membuat harga produk tersebut turun sampai titik tertentu dimana biaya keuntungan sepadan dan tidak berlebih dari biaya produksinya. Bahkan jika keuntungan sampai titik nol pada “harga natural”, maka akan ada insentif untuk memproduksi barang dan jasa, dan semua ongkos produksi, termasuk kompensasi untuk buruh dan pemilik, juga dimasukkan dalam harga barang jual. Sehingga, dari pembagian kerja tersebut, *toh* akan dapat diperoleh keuntungan (dengan dalih kompensasi dari macam-macam jasa). Jika harga jatuh dibawah keuntungan nol, produsen pasti akan keluar dari pasar untuk sementara atau beralih kepada produk alternatif (yang secara natural akan membuat pasar tidak jenuh oleh pasokan satu model barang). Dan, jika mereka melihat aktivitas produksi barang alternatif memberi keuntungan, produsen lain akan masuk ke pasar. Dan demikian seterusnya pasar itu bergerak “bebas”, tetapi sesungguhnya tidak sebebaskan-bebasnya.

Smith juga percaya kalau motivasi manusia seringkali tamak sebab itu memang sifat manusia dan lebih-lebih mereka yang memiliki kekayaan. Namun demikian ia beranggapan bahwa Kompetisi dalam pasar bebas akan menguntungkan masyarakat seluruhnya dengan memaksa harga tetap rendah.

Apa yang dikawatirkan oleh Smith adalah monopoli. Filosof John Locke berkata bahwa individu memang bebas berbuat apa saja untuk membela kepentingan hak miliknya. Tetapi, menurut Locke, hal itu *tidak tanpa batas*. Batas kepemilikan manusia terletak pada kenyataan

<sup>1</sup> “Bukanlah kebaikan dari tukang daging, tukang bir, atau tukang roti yang kita harapkan untuk makan malam kita, tetapi kepedulian mereka pada kepentingan mereka sendiri. Kita berkata kepada diri kita, bukan soal kebaikan manusiawi [dari para pedagang] tetapi pada kecintaan mereka pada diri sendiri [tindakan mereka ditentukan], dan jangan pernah bicara pada mereka mengenai kebutuhan kita tetapi [perbincangkanlah] mengenai keuntungan mereka.”

<sup>2</sup> Keyakinan Smith terungkap dalam kutipan berikut: “People of the same trade seldom meet together, even for merriment and diversion, but the conversation ends in a conspiracy against the public, or in some contrivance to raise prices. It is impossible indeed to prevent such meetings, by any law which either could be executed, or would be consistent with liberty and justice.” (*Wealth of Nations*).

bahwa manusia tidak dapat mengkonsumsi segalanya dalam jumlah semaunya demi dirinya sendiri. Sejalan dengan “individualisme” Lockian yang sesungguhnya bukan tanpa batas, Smith meyakini bahwa monopoli merupakan praktek pasar yang tidak adil. Sebab secara etis monopoli melukiskan penguasaan egoistis dan kesombongan manusia. Hanya, Adam Smith belum bisa merinci cara-cara bagaimana sebuah bentuk pasar dapat “mencegah” monopoli tanpa campur tangan kekuatan penguasa/pemerintah. Sebab, Smith dengan keras menyerang pembatasan dan intervensi pemerintah dalam pasar, yang ia yakini justru akan meruntuhkan emosi pasar dan mengendorokan ekspansi industri serta diversifikasi perdagangan. Yang Smith tolak juga termasuk di dalamnya tarif atau biaya masuk produk-produk impor, karena secara natural akan melambungkan harganya dan mengerem pasar, yang pada saatnya juga akan dibalas oleh negara lain dan secara konkret juga akan berimbas pada pengurangan produk-produk ekspor sendiri.

Gagasan terakhir yang telah dikatakan Smith pada abad ke-18 ini menjadi konkret dalam apa yang disebut perdagangan global saat ini. Ketika mainan anak-anak produk Cina mendapat pengawasan ketat karena ada indikasi bahaya untuk anak (karena zat kimia dalam pewarnaan maupun bahannya), Cina membalas dengan melarang barang-barang produk ekspor Indonesia berupa makanan laut dengan dalih mengandung formalin dan zat kimia lain yang membahayakan.

Gambaran ekonomi pasar bebas Smithian sesungguhnya tidak hanya melukiskan relasi dagang dan bagaimana pasar bekerja secara bebas. Tetapi, teori Smith juga mencetuskan kebenaran bahwa antarbangsa, para pelaku pasar, sesungguhnya menampilkan relasi ketergantungan satu sama lain. Smith mungkin belum merinci secara detail tentang pasar saham/modal, tetapi lalu lintas perdagangan kapital bebas semacam ini jelas mendahului fenomena globalisasi zaman sekarang. Smith sudah memiliki alasannya dua abad yang lalu mengapa kredit macet *sub-prime mortgage* (kredit perumahan beresiko tinggi) di Amerika Serikat yang terjadi baru-baru ini *toh* juga berimbas kepada kelesuan pasar bisnis Indonesia dan dunia. Menteri keuangan Jerman, misalnya, sudah memperingatkan masa-masa sulit akan dialami bisnis Jerman, sebab ketika Dollar turun nilainya dihadapan mata uang Euro (karena kasus kredit macet tersebut) barang-barang ekspor Jerman ke Amerika mendadak akan menjadi lebih mahal dan akibatnya permintaan pasti akan merosot. Dan, apabila itu terjadi, industri Jerman dapat diramalkan akan mengalami masa-masa paceklik paling sedikit selama beberapa saat ke depan sampai ada kebijakan-kebijakan perimbangan baru.

\*\*\*

**Thomas Hobbes dan John Locke.** Thomas Hobbes adalah pencetus pertama konsep yang disebut “kapitalisme”, bukan dalam konteks ekonomi melainkan filsafat. Di bawah ini satu dua kutipannya dari buku *Leviathan*, sebuah buku filsafat politik yang revolusioner pada zaman itu. Dalam kutipan bab IV *Leviathan* yang berbicara tentang *natural law*, manusia dimengerti sebagai dia yang *bebas* untuk mempertahankan diri, menjaga kelestariannya. Dan, untuk itu, manusia diandaikan *bebas* apa saja untuk menggunakan kekuatan akal budinya melakukan aneka tindakan yang diperlukan. Diantaranya, bahkan, bila mungkin, berhak atas “tubuh orang lain”.

Konsep Hobbesian tentang kebebasan membawa kepada kita pengertian telak dan absolut perihal kebebasan, bukan untuk sewenang-wenang (*vain-glory*), melainkan untuk *self-preservation*.

#### XIV: Of the First and Second Natural Laws, and Of Contracts

The right of nature, which writers commonly call *jus naturale*, is the liberty each man hath to use his own power as he will himself for the preservation of his own nature; that is to say, of

his own life; and consequently, of doing anything which, in his own judgement and reason, he shall conceive to be the aptest means thereunto. By liberty is understood, according to the proper signification of the word, the absence of external impediments; which impediments may oft take away part of a man's power to do what he would, but cannot hinder him from using the power left him according as his judgement and reason shall dictate to him.

A law of nature, *lex naturalis*, is a precept, or general rule, found out by reason, by which a man is forbidden to do that which is destructive of his life, or taketh away the means of preserving the same, and to omit that by which he thinketh it may be best preserved. For though they that speak of this subject use to confound *jus* and *lex*, right and law, yet they ought to be distinguished, because right consisteth in liberty to do, or to forbear; whereas law determineth and bindeth to one of them: so that law and right differ as much as obligation and liberty, which in one and the same matter are inconsistent.

And because the condition of man (as hath been declared in the precedent chapter) is a condition of war of every one against every one, in which case every one is governed by his own reason, and there is nothing he can make use of that may not be a help unto him in preserving his life against his enemies; it followeth that in such a condition every man has a right to every thing, even to one another's body.

Berikutnya adalah John Locke, yang disebut peletak dasar kapitalisme. Gagasannya tentang "private property" benar-benar mengukir konsep kapitalistik. Berikut ini satu dua kutipan dari bukunya yang paling terkenal, *Second Treatise on Government*. Dalam buku ini, dikatakan mengenai *untuk pertama kalinya* "private property". Dikatakan bahwa manusia *berhak* memiliki apa yang disebut *private property*, sebab apa yang mengalir dari keringat tubuhnya adalah *hak miliknya*. Dalam Locke konsep tentang "kepemilikan" merupakan konsep krusial yang merevolusi pengertian tentang *natura* manusia. Kelak, Karl Marx akan menggusur konsep *private property* ini dan mengatakannya sebagai sumber "dosa" kapitalisme yang menghantam tata keadilan buruh. Tetapi, di era delapan puluhan, tidak ada lagi negara yang mengadopsi ekonomi sosialis-marxis. Konsep Marx terbukti salah dan *out of date*.

4. To understand political power correctly and derive it from its proper source, we must consider what state all men are *naturally* in. In this state men are perfectly free to order their actions, and dispose of their possessions and themselves, in any way they like, without asking anyone's permission—subject only to limits set by the law of nature.

It is also a state of equality, in which no-one has more power and authority than anyone else; because it is simply obvious that creatures of the same species and status, all born to all the same advantages of nature and to the use of the same abilities, should also be equal in other ways; with no-one being subjected to or subordinate to anyone else, unless God, the lord and master of them all, were to declare clearly and explicitly his wish that some one person be raised above the others and given an undoubted right to dominion and sovereignty

27. Though men as a whole own the earth and all inferior creatures, every individual man has a property in his own person [= 'owns himself']; this is something that nobody else has any right to. The labour of his body and the work of his hands, we may say, are strictly *his*. So when he takes something from the state that nature has provided and left it in, he mixes his labour with it, thus joining to it something that is his own; and in that way **he makes it his property**.

\*\*\*

“Isme-isme” masuk dalam percakapan tentang Pancasila umumnya dikerjakan karena perkara *perennial* keadilan sosial. Indonesia bergulat hebat dengan perkara keadilan menyusul problem kemiskinan, kurangnya lapangan kerja, dan pengurusan sumber-sumber alam. Pancasila dipandang sebagai ideologi bangsa yang “masih mencari” format ekonomi. Dan, dalam kenyataannya ekonomi Pancasila banyak mengadopsi sistem konglomerasi, sistem yang mengajukan para pemodal sebagai “subjek” ekonomi. Akibatnya, investor-investor besar “memainkan” tata kehidupan ekonomi yang meminggirkan rakyat kecil. Konsep ini bukan hanya melanda kebijakan pembangunan ekonomi perkotaan, melainkan terutama juga pedesaan, wilayah-wilayah terpencil.

Jika kita berbicara tentang “sosialisme”, halnya sudah sangat jauh berbeda dengan sosialisme sebagaimana ditawarkan komunisme. Dan, kapitalisme pun sudah bukan itu yang terjadi di masa lampau. Sistem ekonomi dewasa ini benar-benar berbeda dengan apa yang menjadi milik abad lampau. Yang membedakan bukan hanya soal kebutuhan melainkan juga *means* (sarana) dan metodologi dan tata hidup manusia secara menyeluruh. Konsep kepuasan tata adil juga tidak semata-mata perkara pembagian keuntungan atau materi.

Di lain pihak, perkara ketidakadilan juga semakin canggih menggerogoti kehidupan sehari-hari. Berbagai bentuk kejahatan terselubung sungguh tidak mudah diungkap. Artinya, saat ini kita sedang berada dalam kawasan hutan kehidupan yang sungguh-sungguh “lebat” dan gelap perkaranya.

\*\*\*

***Panorama gerakan-gerakan pencerahan Indonesia.*** Uraian di bawah ini memiliki asumsi demikian: Perjalanan panoramik politik Indonesia pertama-tama adalah “sembulan-sembulan aneka gerakan pencerahan”. Disebut “sembulan”, karena merupakan peristiwa-peristiwa yang secara khas milik zamannya, lahir dari kreativitas dan pasionitas (rasa cinta yang berkobar-kobar) anak-anak muda negeri ini terhadap bangsanya. Dikatakan “sembulan” karena juga bukan merupakan sebuah seri peristiwa yang berlangsung sistematis. Di suatu waktu muncul dahsyat. Di kesempatan lain, tampil redup. Tetapi peristiwanya menggebrak, mengubah, mencerahkan.

Panorama sejarah gerakan politik Indonesia merupakan gerakan pencerahan. Dengan “gerakan yang mencerahkan” dimaksudkan pertama-tama *bukan gerakan emosional* belaka. Artinya, aneka peristiwa politik di negeri ini *mengandaikan dan memiliki rasionalitas*. Dan, jika disimak secara lebih detil, aneka gerakan para tokoh muda Indonesia pada dekade sepuluh, dua puluh, tiga puluh, empat puluh-an abad yang lalu dalam melawan pemerintahan kolonial memiliki efektivitasnya justru karena gerakan mereka memiliki pondasi rasionalitas dan intelektualitas yang sangat kokoh. Para tokoh perjuangan adalah para pelajar, kaum cendekia,

ulama yang membaca buku<sup>3</sup>, belajar terus-menerus<sup>4</sup>, dan mengikuti perkembangan zaman. Segala apa yang menjadi hambatan emosional untuk bersatu seperti ideologi, kesukuan, agama, ras, latar belakang pendidikan, bahasa dapat mereka atasi secara mengagumkan. Komitmen intelektual yang mencerahkan dari mereka-lah yang membuat kekuasaan pemerintahan kolonial runtuh.

### 1. "Sapere Aude" Indonesiana: Gerakan Pencerahan

"Sapere Aude" adalah emblem ungkapan Zaman Pencerahan dalam sejarah peradaban manusia. Di Eropa kronologi Zaman Pencerahan terpatri pada pertengahan abad ke-18. "Pencerahan" dalam bahasa Inggris dipakai istilah "Enlightenment" dan Jerman "Aufklärung". Pencerahan melanda hampir seluruh Eropa, Inggris, Jerman, Perancis dan Italia. Periode ini mengantisipasi sebuah peradaban yang akan mengubah tata sosio-politik Perancis dan dunia, yaitu Revolusi Perancis yang berlangsung konon selama seratusan tahun (1789 dan seterusnya). Terminologi "Sapere Aude", seperti yang dikatakan oleh filosof Immanuel Kant<sup>5</sup>, secara persis merujuk pada tindakan (gerakan) yang berani untuk berpikir sendiri. "Berpikir sendiri" maksudnya berani untuk keluar dari inferioritas, ketidakdewasaan, kepicikan sendiri (atau "man's release from his self-incurred tutelage").<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Simak bagaimana Tan Malaka selalu tergila-gila dengan buku dan di mana pun dia pergi (keliling dunia) selalu membeli buku-buku sampai-sampai ketika di penjara ia berhasil menulis sebuah buku dengan ketepatan yang nyaris tiada duanya. Tanpa sumber buku di tangan! Tulisan yang luar biasa itu diberinya nama *Madilog*. Atau, lihatlah Soekarno dan tokoh-tokoh pergerakan seperti Dokter Tjipto Mangoenkoesoema yang dibuang oleh Pemerintah kolonial dan merasa sedih karena tidak bisa membawa serta buku-buku mereka untuk dibaca. Konon Romo Driyarkara di tahun 1950-60an mengungkapkan betapa semangat membaca Ir Soekarno luar biasa: kerap meminjam buku kepadanya tetapi juga kadang-kadang lupa mengembalikannya! Jika kita membaca tulisan-tulisan Soekarno, kita seperti diajak untuk melakukan safari ide-ide filosofis, politis, sosial, kultural, ideologis yang sangat ramai dengan bahasa yang khas menggerakkan, menggoyahkan.

<sup>4</sup> Di awal tahun 1920-an, Mohammad Hatta menulis dua artikel perihal kerugian bagi para petani apabila mereka menyewakan tanahnya. Artikel itu berjudul "Kedudukan ekonomi para penyewa tanah orang Indonesia" (*De economische positie van den Indonesischen grondverhuurder*) dan "Beberapa catatan tentang ordonansi penyewaan tanah di Indonesia" (*Eenige aantekeningen betreffende de grondhuur-ordonnantie in Indonesië*). Tulisan itu merupakan tulisan kritis. Tetapi, lihatlah "perjuangan" Hatta untuk menulis artikel itu: "Itulah tulisanku pertama dalam *Hindia Poetra*. Sekalipun pengetahuanku belum banyak tentang ekonomi, aku berusaha sedapat-dapatnya buah tanganku berdasarkan ilmiah [...] Lama juga waktu yang kupergunakan untuk mengarang dua karangan itu. Kalau aku tak salah, kira-kira 6 bulan. Sambil belajar aku mengarang dan sedapat-dapatnya membaca pula buku yang dapat aku pergunakan sebagai bahan atau dasar. Lambat-laun itu menjadi kebiasaanku. Aku memperoleh dasar ilmiah bagi buah tanganku dan pengetahuanku bertambah dalam dan luas." Simaklah *Mohammad Hatta: Memoir* sebagaimana dikutip dalam Parakitri Simbolon, *Menjadi Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2006, 647.

<sup>5</sup> Kant answers the question quite succinctly in the first sentence of the essay: "Enlightenment is man's emergence from his self-incurred immaturity." But the answer itself is so enlightening, that it requires another 2,600 words from Kant to fully develop the concept. He continues that the immaturity is self-inflicted not from a lack of understanding, but from the lack of courage to use one's reason, intellect, and wisdom without the guidance of another. Our fear of thinking for ourselves. He exclaims that the motto of enlightenment is "Sapere aude"! - Dare to be wise! The German word *Unmündigkeit* means not having attained age of majority or legal adulthood. It is sometimes also translated as "tutelage" or "nonage" (the condition of "not [being] of age"). Kant, whose moral philosophy is centered around the concept of autonomy, is distinguishing here between a person who is intellectually autonomous and one who keeps him/herself in an intellectually heteronomous, i.e. dependent and immature status.

The majority of people are lazy cowards who gladly remain in this immature state for their entire lives. Why? Simply because immaturity is convenient. Why is it convenient? Because "guardians" such as books, doctors, spiritual advisors, and anyone whom we can pay to think for us, does the heavy mental lifting and tells us how to think. Further, these guardians have convinced us that we don't have to think. For "the largest part of mankind (including the entire fair sex)", not only is thinking difficult, but it is dangerous. It doesn't matter that the danger is NOT great. We have been intimidated into thinking that it is and therefore we are fearful of taking that first step into thinking for ourselves.

Abad Pencerahan (*Sapere Aude*) di Indonesia memiliki keragaman sembulan. Kita dapat menyebut seperti “Pemberontakan batin dan kesadaran Kartinian (1879-1904) yang tersembunyi dalam surat-suratnya”, “Kisah tragis Saidjah dan Adinda dalam karya Multatuli (atau Eduard Douwes Dekker 1820-1887) yang berjudul *Max Havelaar* (terbit 1860) yang untuk pertama kalinya mengumumkan kebobrokan sistem kolonial dengan segala kebijakan dagangnya yang menindas rakyat”, “Kreativitas Wahidin Soedirohoesodo dengan terbitan surat kabarnya dalam bahasa Melayu dan Jawa, *Retnodhoemilah*, lantas dengan penuh semangat mendorong dan terlibat dalam pendirian Boedi Oetomo 1908 yang menjadi cikal-bakal dari “National Awakening”. Tentu saja, pendirian dari Sarekat Islam (atau Sarekat Dagang Islam) pada periode berikutnya juga amat menandai sebuah periode *Aufklärung* Indonesia.<sup>6</sup>

Karena merupakan sembulan, peristiwa lain yang dapat disebut lagi sebagai komponen periode Pencerahan di Indonesia adalah gerakan “revolusi” pendidikan yang ditawarkan oleh seorang Pastor Katolik, Franciscus Georgius Josephus van Lith SJ atau sering disebut “Romo van Lith” (1863-1926). Van Lith mendirikan sekolah guru di Muntilan tahun 1900, sekolah guru berbahasa Belanda 1904, dan pendidikan para kepala guru 1906. Dari sendirinya Romo van Lith berkebangsaan Belanda. Tetapi, pada pendirian *Volksraad* tahun 1917 (semacam DPR bentukan Pemerintah kolonial yang usulan awalnya terdiri dari 25 anggota Bumiputera, 30 orang Belanda, sisanya 3 atau 5 dari golongan lain<sup>7</sup>), Romo van Lith justru diusulkan oleh K.H. Agus Salim untuk menjadi anggota *Volksraad* sebagai wakil dari pribumi!

Posisi politik Romo van Lith, seorang misionaris Belanda Katolik, kita ketahui dari tulisannya, “Kedudukan Nederland terhadap Hindia-Belanda” (*De positie van Nederland ten opzichte van Nederlandsch-Indië*):

Pemerintah Belanda menginginkan supaya para misionaris berdiri di pihaknya, dan orang-orang Bumiputra juga mengharapkan hal yang sama. Dalam hal ini para misionaris harus berdiri di pihak anak-anak negeri. Sikap ini mengandung risiko ketika anak-anak negeri terpaksa menggunakan cara-cara yang tidak sejalan dengan hukum. Kalau demikian, apakah yang harus dilakukan oleh para misionaris? Semua orang tahu bahwa kami para misionaris ingin bertindak sebagai pihak perantara. Namun, jika keadaan tidak dapat dikendalikan lagi dan terpaksa terjadi pertentangan yang memaksa kami memilih pihak, maka kami harus berdiri di pihak anak-anak negeri!<sup>8</sup>

Dengan tulisan yang semacam ini, dalam konteks waktu itu, semestinya Romo van Lith dapat diajukan ke pengadilan. Jelas nadanya adalah “sikap menentang Pemerintahan kolonial”. Tetapi, tulisan semacam ini menjadi semacam inspirasi pembelaan dari empat tokoh pergerakan

---

See “Answering the Question: What is Enlightenment?” in [http://en.wikipedia.org/wiki/What\\_is\\_Enlightenment%3F](http://en.wikipedia.org/wiki/What_is_Enlightenment%3F) (Accessed in May 10, 2013)

<sup>6</sup> Ariel Haryanto mempersoalkan “genuitas” Boedi Oetomo sebagai sebuah gerakan nasional, karena menurutnya Boedi Oetomo bersifat aristokrat dan eksklusif kaum terpelajar (identik dengan masyarakat kelas menengah ke atas pada waktu itu). Sementara itu gerakan-gerakan Sarekat Dagang Islam lebih populis dan egaliter, yang karenanya lebih menandai sebuah gerakan kebangkitan nasional. Lihat Ariel Heryanto, “Questioning the relevance of national awakening today,” *The Jakarta Post*, 21 May 2008. Archived at <http://blogs.arts.unimelb.edu.au/arielh/2008/05/22/on-national-awakening>. Menurut saya, kategorisasi yang diajukan oleh Ariel Haryanto tidak *plausible*. Sebab, karakter-karakter sosiologis yang diberikan terlalu memiliki nuansa kacamata sekarang. Sementara, ketika sebuah gerakan semacam Boedi Oetomo menjadi mungkin pada waktu itu, justru karena para anggotanya mampu merespon bagaimana sebuah pendirian pergerakan didirikan. Sarekat Dagang Islam itu sendiri pada waktu itu tidak lepas dari ideologi keislaman yang egaliter. Sementara Boedi Oetomo menjalankannya dalam konteks pergumulan, kultur Jawa.

<sup>7</sup> Lih. Parakitri Simbolon, *Menjadi Indonesia*, Jakarta: Kompas 2006, 658. Tetapi, dalam Wikipedia, disebutkan awalnya 38 jumlah keseluruhan, diantaranya 15 dari Bumiputera. Sementara itu di tahun 1920-an, mayoritas anggotanya sudah kebanyakan Bumiputera. Lih. <http://id.wikipedia.org/wiki/Volksraad> (akses 10 Mei 2014).

<sup>8</sup> Tulisan ini memiliki tahun penulisan sekitar 1920-an sebagaimana dikutip dari Parakitri Simbolon, *Op.cit.*, 685-686.

nasional di Belanda (Hatta, Nazir Pamoentjak, Ali Sastroamidjojo, dan Abdoel Madjid Djodjoningrat) yang ditangkap dan diadili karena tulisan-tulisannya yang kritis. Tak pernah kita lupakan *remarks* dari Snouck Hurgranje dalam bukunya, *Nederland en Islam*, demikian:

Camkanlah tuan-tuan yang terhormat, sekalipun tuan-tuan menjatuhkan hukum terberat atas keempat orang ini (Hatta, Ali Sastro, Nazir, Abdoel Madjid), tuan-tuan tidak akan berhasil menjadikan mereka “penjahat”. Tetapi tuan-tuan akan menjadikan mereka martir yang oleh bangsanya akan dipuja sebagai pahlawan-pahlawan kemerdekaan.<sup>9</sup>

## 2. Dekade Duapuluh: Mengalahkan “Self-incurred Tutelage”

Periode dekade dua puluhan dihiasi dengan aneka ragam gerakan pencerahan yang mengerucut pada sebuah deklarasi gemilang, *Sumpah Pemuda* 1928. Periode pergerakan nasional dekade dua puluhan dari negeri ini kerap hanya dimaknai sejauh peristiwa 1928. Padahalnya, periode ini penuh dengan lobi-lobi tingkat tinggi di antara para pemuda Indonesia untuk mengurai identitas nasionalnya. Kalimat-kalimat Sumpah Pemuda “Bertumpah darah satu, Indonesia; Berbangsa satu, Indonesia; dan Berbahasa satu, Indonesia” merupakan komponen-komponen frase yang tidak sekali jadi. Kalimat-kalimat itu melukiskan pergumulan rasional, politik, kultural sekaligus. Pada dekade ini kita memiliki tokoh-tokoh muda seperti Muhammad Yamin, Soegondo Djopoespito, Tan Malaka, Marah Soetan, Poernomowoelan (nona), Mangoensarkoro, Ki Hadjar Dewantara, J. Leimena, Sukarno, Agus Salim, dan beberapa tokoh keturunan Cina, dan seterusnya. Mungkin periode ini dapat disebut sebagai dekade paling *flourishing* dari filsafat politik para tokoh pergerakan Indonesia untuk mengurai paham-paham kesatuan, kebangsaan, ke-Indonesia-an (dalam imaginasi) yang mengatasi sekat-sekat primordial seperti kesukuan, budaya, ideologi, agama, dan – yang paling krusial – bahasa.

Peristiwa “Sumpah Pemuda” Oktober 1928 itu sendiri sesungguhnya merupakan rangkaian dari rapat-rapat para pemuda tokoh pergerakan, yang sering kali disebut sebagai Kongres Pemuda II (sementara Kongres Pemuda yang pertama telah berlangsung tanggal 30 April – 2 Mei 1926 untuk mewujudkan persatuan pemuda Indonesia). Sebagai sebuah kongres atau rapat besar, penyelenggaraannya memiliki kepanitiaan yang susunannya sebagai berikut:

Soegondo Djopoespito (ketua) – dari PPPI (Permoefakatan Perhimpunan Pemuda Indonesia)  
 Djoko Marsaid (wakil ketua) – Jong-Java (Pemuda Jawa)  
 Muhammad Yamin (sekretaris) – Jong-Sumateranen Bond  
 Amir Sjarifuddin (bendahara) – Jong-Batak  
 Djohan Mohammad Tjai (pembantu I – Jong-Islamieten Bond  
 Katjasoengkono (pembantu II) – Pemoeda Indonesia  
 Senduk (pembantu III) – Jong-Celebes  
 J. Leimena (pembantu IV) – Jong-Ambon  
 Rohjani (pembantu V) – Pemoeda Kaoem Betawi

Konon, hadir dalam Kongres II di sebanyak 750 orang, yang tidak hanya terdiri dari para pemuda Bumiputera, tetapi juga keturunan Cina dan Belanda. Sidang-sidang utama dijalankan tiga kali di tempat-tempat yang berbeda-beda yang pada waktu itu *biasa* mereka gunakan. Sidang pertama (Sabtu malam 27 Oktober) berlangsung di Gedung Pemuda Katolik (Katholieke Jongelingen Bond) di Waterlooplein (Jl. Lapangan Banteng), sidang kedua (Minggu pagi 28

<sup>9</sup> Sebagaimana dikutip dari. *Ibid.*, 687.

Oktober) di gedung bioskop “Oost Java” di Koningsplein Noord (Medan Merdeka Utara), dan sidang ketiga (Minggu Malam 28 Oktober) di Gedung Klup Indonesia (*Indonesische Clubgebouw*) di Kramat (Jl. Kramat Raya 106).<sup>10</sup>

Yang menarik untuk disimak di sini adalah partisipasi para Pemuda Katolik. Agak sukar untuk menyebut siapa saja yang ambil bagian dalam perhelatan kaum muda ketika itu. Tetapi, yang pasti para Pemuda Katolik tidak absen, bahkan secara kreatif menjediakan tempat untuk itu.

Di akhir sidang ketiga, dibahas bagaimana dikembangkan rasa persatuan dan cinta tanah air lewat kegiatan kepanduan (*padvinderij*). Tema ini didahului oleh pidato-pidato yang menunjukkan formasi persatuan: Ramelan yang beragama Islam dari kepanduan Sarekat Islam, Theo Pangemanan yang beragama Kristen dari kepanduan Nasional, dan Mr. Soenarjo sebagai ketua Persaudaraan Antara Pandoe Indonesia. Ketiganya menegaskan bahwa perbedaan agama sama sekali tidak menjadi halangan untuk bersama-sama membicarakan perasaan persatuan dan kebangsaan. Dan, secara mengejutkan di akhir acara ini diperdengarkan alunan lagu ciptaan Wage Rudolf Supratman, wartawan *Sin Po*, seorang Kristen dengan biola diiringi piano oleh Dolly Salim (Putri Haji Agoes Salim), seorang Muslimah.

Dari segala yang bisa dikatakan tentang dekade dua puluhan-an ialah bahwa para tokoh pergerakan merupakan pribadi-pribadi yang secara idealis mampu mengatasi *self-incurred tutelage*-nya. Mereka bukan saja telah menampilkan keberanian untuk berpikir sendiri, melepaskan diri dari kungkungan kolonial, melakukan perlawanan rasional. Melainkan, mereka juga telah berani menyeberangi lautan dan gunung penghalang sekat-sekat kesukuan, agama, budaya, aneka dorongan primordialnya.

Dengan kata lain, para Pemoeda Indonesia dekade dua puluhan telah mengalahkan musuh dan dirinya mereka sendiri.

### 3. Dekade Tiga-Empatpuluh: Kemerdekaan itu

Era tiga-puluh dihiiasi dengan tampilnya sebuah keberanian yang menyeruak. Tetapi, belum menampilkan sebuah gerakan efektivitas. Keberanian di era ini, misalnya, hadir dalam dilayangkannya sebuah Petisi kemerdekaan, yang disebut dengan petisi Soetardjo. Petisi yang dilayangkan ke Ratu Wilhelmina tersebut ditandatangani oleh anggota Volksraad tahun 1936, di antaranya juga ditandatangani oleh I.J. Kasimo dan Sam Ratulangi.

Dekade empat-puluh dapat disebut sebagai salah satu puncak pergulatan Periode Pencerahan Politik bangsa Indonesia. Bukan semata pada dekade ini diproklamasikan Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, tetapi juga lantaran filsafat politik para Pendiri Negara ini menjadi sebuah pembelajaran yang gemilang. Bahkan, produk dari rasionalitas para Pendiri Negara dapat disebut menjadi rujukan tunggal perjalanan dari bangsa ini. Peristiwa ini menjadi rujukan konsep-konsep filosofis-ideologis negara, sistem hukum, kebersatuan bangsa, dan seterusnya. Kategorisasi politik semacam golongan Islam, golongan Nasionalis memiliki akar di sini, yaitu saat mereka berdiskusi tentang dasar-dasar negara Indonesia merdeka, Konstitusi 1945. Kategorisasi ini makin mengerucut pada sidang Konstituante 1957 dan lantas terbawa-bawa hingga hari ini.

### 4. Dekade Limapuluh: Mendefinisikan Identitas Bangsa

Dekade lima puluhan menjadi semacam kelanjutan langsung dari dekade empat puluhan, yaitu politik Indonesia berada dalam ranah kesibukan mendefinisikan identitas

<sup>10</sup> *Ibid.*, 695.

ideologis negara dan bangsa. Ketegangan demi ketegangan berlangsung di berbagai tingkat kehidupan masyarakat. Terjadi beberapa konflik berdarah, lantaran pemberontakan fisik. Beberapa kelompok Islam menampilkan radikalismenya. Sementara itu, kelompok-kelompok partisan komunis mengambil sikap-sikap agresif, memicu aneka pertentangan dalam masyarakat. Dekade lima puluhan ramai di dalam dan di luar parlemen. Belum dapat dibayangkan sebuah tata kehidupan yang mengedepankan pembangunan. Maklum, pemindahan kekuasaan dari Pemerintahan kolonial *bukan* terjadi ketika Proklamasi 1945, melainkan pada maraton sidang Perjanjian Meja Bundar 1949. Artinya, Pemerintah Indonesia sesungguhnya baru “terbentuk” ya di tahun ini. Pemindahan kekuasaan *bukan* perkara sepele, bukan perkara saat ini kekuasaan ada di tangan putera-puteri Indonesia. Pemindahan kekuasaan meminta pula bentuk-bentuk yang kurang lebihnya telah kokoh, seperti identitas ideologis dan bagaimana sistem parlementer/presidensiil mesti dijalankan, di samping sistem hukum-kultur-pendidikan, dan seterusnya.

Tidaklah mengherankan bahwa rekaman peristiwa-peristiwa dekade lima puluhan ini menampilkan sebuah dinamika luar biasa. Kita beruntung memiliki seorang indonesianis (ahli yang mengeksplorasi sejarah modern Indonesia), **Herbert Feith** (1930-2001) yang tekun menghimpun dan menggali dinamisme Indonesia periode ini.<sup>11</sup> Dari Herbert Feith-lah kita memiliki gambaran-gambaran yang kurang lebih persis tentang berbagai perdebatan, kegemilangan Pemilu pertama 1955, dan bahkan beberapa saat menjelang “decline”-nya Indonesia di periode 1960-an. Herbert Feith lahir di Austria dari keluarga Yahudi, lari dari sergapan NAZI ke Australia dan memiliki minat tinggi pada studi tentang Asia Tenggara dan konon juga amat mencintai Indonesia. Dari Herbert Feith, kita memiliki para indonesianis dari Amerika yang juga sangat mencintai Indonesia, di antaranya Daniel S. Lev, Benedict Anderson, Ruth McVey.

Herbert Feith mengetik semacam reportase singkat tentang Pemilu 1955 sekaligus dengan pembagian kursinya yang lantas diterbitkan oleh Cornell University dengan judul *The Indonesian elections of 1955*. Buku ini dapat dinikmati dalam situs yang khusus dibaktikan untuk menguak sejarah modern Indonesia oleh Cornell University di <http://digital.library.cornell.edu/c/cmip/browse.html>, sebuah situs internet yang sungguh penting dan bermutu.

Dalam konteks *Katolik dan Politik*, kita mendapat informasi penting tentang eksistensi Partai Katolik yang mendapatkan suara terbanyak nomor 7. Partai Katolik terlihat eksis dan diperhitungkan. Tokoh paling populer ketika itu adalah I.J. Kasimo, Frans Seda, Ben Mang Say, dan seterusnya.

Dalam buku, *Republic of Indonesia Cabinets, 1945-1965*, garapan Susan Finch and Daniel S. Lev<sup>12</sup>, kita disuguhi sebuah panorama politik Indonesia, yang jika kita baca dengan kacamata sekarang terasa dinamis, aneh. Pemerintahan Indonesia mengalami jatuh bangun kabinet (yang dipimpin oleh Perdana Menteri), yang ketika itu Pemerintahan Indonesia berada dalam sistem

<sup>11</sup> After a short break in Australia, Herbert and his new wife, Betty, returned to Indonesia as volunteers under the scheme. As a student of politics it was natural that he should observe closely the Indonesian political scene, and his detailed knowledge brought him to the notice of George McT Kahin a leading American scholar of Indonesia and led to the offer of a graduate scholarship at [Cornell University](http://Cornell University). At Cornell, between 1957 and 1960, he wrote what was to be recognised as the definitive study of Indonesia in the 1950s, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, as well as other monographs published by the Cornell Modern Indonesia Project. His fellow students in the Program included Daniel Lev, [Benedict Anderson](http://Benedict Anderson) and Ruth McVey. See [http://en.wikipedia.org/wiki/Herbert\\_Feith](http://en.wikipedia.org/wiki/Herbert_Feith) (accessed in May 10, 2014).

<sup>12</sup> Buku ini di-upload oleh Cornell University dan dapat dinikmati di <http://digital.library.cornell.edu/cgi/t/text/pageviewer-idx?c=cmip;cc=cmip;rgn=full%20text;idno=cmip038;didno=cmip038;view=image;seq=3;node=cmip038%3A2> (akses 10 Mei 2014).

parlementer dan bukan presidensiil. Pemerintahan ketika itu ada usianya satu tahun, enam bulan, bahkan satu bulan (Kabinet Susanto di Desember 1949-Januari 1950!).

Dekade lima puluhan yang paling brilian, menurut saya, adalah saat dijalankannya sidang Konstituante. Sidang Konstituante adalah sidang-sidang untuk menyusun Konstitusi Negara. Memang Sidang itu telah dipandang gagal, karena tidak mencapai kata sepakat tentang dasar ideologi negara. Sebuah perdebatan yang secara konkret menjadi emblem ketegangan dari bangsa ini, perdebatan antara kelompok Nasionalis dan kelompok Islam. Yang pertama mengusung Pancasila, sementara yang kedua mengupayakan Syariat Islam. Konstituante yang telah menjalankan sidang-sidangnya sejak 1957 itu lantas dibubarkan oleh Presiden Soekarno dengan dekret 5 Juli 1959.

### 5. “Sapere Aude” Atmodarminto-an

Salah satu *remark* paling berani untuk menggagas penolakan atas Syariat Islam sebagai wujud “Negara Islam” diungkapkan dalam salah satu pidato yang diberikan oleh Atmodarminto dari Partai Gerinda (Gerakan Indonesia Raya) di salah satu sidang Konstituante tahun 1957. Atmodarminto adalah ayah dari Wiyogo Atmodarminto, mantan Gubernur Jakarta. Gerinda adalah partai kecil ketika itu. Keberaniannya mengemukakan argumentasi menentang pendirian “Negara Islam” memunculkan amarah tokoh-tokoh partai Islam, tetapi secara adil dia menunjukkan realitas perjalanan bangsa Indonesia yang sarat akan pertikaian dan pengorbanan. Sejarah bangsa Indonesia *bukanlah* sejarah Islam atau *bukan* sejarah yang *menuju* Keislaman.

Sejarah Indonesia, menurut Atmodarminto, adalah sejarah konflik dan pertengkarannya sejak Hindu, Budha, dan terlebih ketika kerajaan-kerajaan Islam mulai menguasai Jawa. Tetapi, di antara Islam sendiri, telah ada perpecahan dan konflik berdarah. Tidak ada kesatuan dalam raja-raja Islam. Atmodarminto adalah seorang Islam. Ia termasuk keluarga kerajaan Yogya atau Solo (?). Berikut ini satu dua kutipannya dari buku yang dihimpun oleh Herbert Feith dan Lance Castles, dengan judul *Indonesian Political Thinking 1945-1965* (Ithaca and London: Cornell University, 1970):<sup>13</sup>

Pada saat sekarang ini masyarakat kita pada umumnya tidak dapat disebut sebagai masyarakat Islam. Kepercayaan dan adat istiadat tinggal dari kakek moyang seperti percaya kepada jiwa atau rohnya para leluhur, yang dianggap dapat memberi kebahagiaan hidup, masih menjadi pangkal dari masyarakat kita pada umumnya [...] Menurut saya agama Islam tidak pernah dapat menguasai jiwa rakyat yang terbesar dari Indonesia. Memang, rakyat yang terbesar suka memeluk agama Islam, tetapi mereka itu memeluk agama Islam dengan paham Islam abangan, ialah Islam dengan jiwa yang masih penuh dengan kepercayaan lain [...] Setiap orang tahu bahwa rakyat Indonesia terdiri dari bermacam-macam kelompok kepercayaan dan agama dan diantaranya ada empat agama yang diakui Pemerintah: Islam, Kristen, Katolik, Kristen Protestan, Hindu Bali. Dan dalam kelompok agama Islam, masih ada kelompok Islam *mutihan* dan Islam abangan. Menurut saya, usulan pendirian negara Islam jelas akan ditentang oleh ketiga kelompok lain (yang bukan Islam) dan masih akan ditentang juga oleh kelompok Islam abangan yang perasaan nasionalismenya tinggi [...]

Kemudian, Atmodarminto mengemukakan argumentasi yang secara *straight to the point* menyatakan penolakannya atas dasar negara Islam

<sup>13</sup> Buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, Jakarta: LP3ES, 1988. Tentang pidato Atmodarminto, dapat dilihat di halaman 184-188.

Karena semenjak revolusi nasional kita yang dimulai dengan Proklamasi hingga sekarang Dasar Negara kita Republik Indonesia belum pernah berganti dan belum pernah mengalami perubahan, maka dasar-dasar kenegaraan lain-lainnya termasuk dasar Islam, belum mempunyai sejarah di dalam negara kita Republik Indonesia, dan karena itu maka pendapat yang memasukkan Islam dijadikan Dasar Negara adalah pendapat baru dan saya anggap sangat ideal dan spekulatif dan bilamana dilaksanakan resikonya mungkin terlalu besar. Yang pasti akan menimbulkan perpecahan di antara kita sama kita, dan mungkin menghebat hingga pecah perang saudara. Pelaksanaan dari pendapat No 2 [dalam sidang Konstituante] atau Islam dijadikan Dasar Negara itu berarti, bahwa hasil dari revolusi nasional kita akan diambil atau dikutup seluruhnya oleh golongan Islam saja, atau bahwa golongan-golongan agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan lain-lainnya, golongan kebatinan akan dijadikan indung tempel atau *tlosor* saja. Meskipun telah disampaikan bahwa jika Islam dijadikan dasar negara, hal itu tidak akan merugikan kelompok-kelompok agama lain, akan tetapi hal itu hanyalah sekedar alasan dan janji-janji belaka yang saya ragukan dan saya sangsikan [...]

Pidato Atmodarminto, menurut saya, memiliki bahasa realis-historis. Pidato itu sendiri sudah barang tentu sangat *disputable* jika disimak dalam perspektif Islam. Tetapi, pidato Atmodarminto merupakan salah satu cetusan *Sapere Aude* yang sulit dicari kembarannya dalam sejarah pergerakan politik Indonesia sejak pertama kalinya dijalankan perdebatan tentang ideologi negara sampai saat ini.

Mungkin, Pidato Atmodarminto dapat disejajarkan dengan “interupsi” Latuharhary pada pembahasan sidang-sidang BPUPKI tentang UUD 1945. Ketika itu, Latuharhary secara terang-terang menolak dicantumkannya tujuh kata dalam penegasan Syariat Islam sebagai kelanjutan dari Sila Pertama, Ketuhanan Yang Mahaesa. Setelah Latuharhary dan Atmodarminto, bahasa kritis terhadap agama dan diktatorisme agama kurang mengemuka.

Episode dinamisme politik Indonesia era dekade lima puluhan demikian kaya hingga seorang indonesianis, Daniel S. Lev berujar bahwa era ini masih menyimpan harta karun untuk terus digali dan dieksplorasi oleh para cendekia Indonesia. Bagi saya, ini merupakan salah satu periode di mana filsafat politik Indonesia dipertaruhkan secara *blunt*. Bahasa kritis ideologis agamis bertarung satu sama lain, menorehkan hipotesis-hipotesis ilmiah tentang peradaban manusia Indonesia.

Jika Anda seorang Katolik, saran saya, janganlah mencari momen-momen yang secara terpisah Anda maksudkan sebagai kontribusi *genuine*. Kekatolikan campur baur dengan keprihatinan bangsa untuk mendefinisikan ideologi negara. Ideologi bukanlah sebuah ilmu (*logos*) tentang ide (*idee*). Ideologi mengungkapkan pula warna, pola, *Weltanschauung*, horison dan nyaris segalanya tentang perjalanan bangsa ini. Kekatolikan lebur bersama keislaman dan nasionalitas. Maksudnya: kekatolikan adalah juga perjuangan untuk menegakkan kebenaran sebagai pondasi keutuhan bangsa ini.

## 6. Dekade Enampuluhan: Kegelapan

Periode enampuluhan menjadi sebuah sejarah tragis perjalanan bangsa ini. Pemerintahan Orde Baru kerap menulisnya sebagai sebuah kemenangan Pancasila (melawan Komunisme). Tetapi, perspektif pandangan ini masih berada pada orientasi kekuasaan ideologis. *De facto*, terjadi pembantaian dan pertumpahan darah yang tak terbilang jumlahnya. Dan, lebih tragis lagi, dari nyawa jutaan manusia itu, tak terhitung yang tak berdosa. Artinya, ini adalah periode paling gelap bangsa kita, sejak Kisah Penciptaan! Saya urung menulisnya sebagai salah satu puncak pergerakan *Enlightenment* bangsa ini.

Sementara itu, catatan panoramik saya atas tahun-tahun sesudah enam-puluhan masih seputar kritik-kritik ideologis atas kekuasaan Orde Baru yang bersinar di luar tetapi keropos di dalam. Tetapi, bagaimanapun juga, saya adalah “anak zaman” ini. Saya masih terus berusaha merefleksikannya.

Dekade tujuh-puluhan Indonesia berada dalam disposisi kegamangan. Dunia ketika itu hampir sepertiga dikuasai oleh komunisme. Sebagai negara yang bukan komunis, Indonesia tidak mengambil sikap netral terhadap pergolakan politik di Timor Timur. Indonesia masuk dan ikut campur tangan untuk menghantam komunis. Situasi itu untuk sementara dapat dipahami, apalagi juga ketegangan ideologis ditandai dengan persetujuan antara Barat dengan komunisme. Dan, dari sendirinya, Indonesia tidak mengambil sikap kolaboratif dengan negara-negara komunis.

Dekade delapan puluhan barangkali dapat disebut sebagai salah satu era paling kreatif dalam menggali Pancasila. Banyak buku tentang Pancasila terbit. Dalam periode ini dan sembilan puluhan, Indonesia dikenal sebagai “macam Asia” dalam bidang ekonomi. Tetapi hal itu tidak berlangsung lama seiring dengan fondasi ekonomi Indonesia yang sangat rapuh, karena didasarkan pada hutang. Di lain pihak, saat dunia mulai menanggalkan konsep ideologis kaku, Indonesia masih gamang dalam mengurai tentang sejarah masa lampunya.

Di dalam negeri sampai periode sembilan puluhan, Pemerintahan Orde Baru mempromosikan ideologi pembangunan secara amat gencar. Dengan berbagai cara dan dalam hampir di segala sektor kehidupan, ideologi pembangunan menjadi nada dasar, seolah nafas kehidupan. Tetapi, pemerintahan yang koruptif dan diktator menjadi kanker di tubuh bangsa Indonesia. Puncaknya: krisis hebat tahun 1998 dan sesudahnya. Indonesia babak belur. Konflik berdarah-darah menjadi kabar setiap hari.

Tujuh belas tahun berikutnya merupakan periode yang identik dengan “ penemuan identitas” sosial, kultural, politik. Penemuan identitas biasanya terjadi ketika sebuah bangsa lepas dari cengkeraman tirani. Di saat ini dimungkinkan percakapan politik yang bebas. Komponen-komponen militeristik dikembalikan kepada tempatnya. Ancaman represif dari pemerintahan dikikis sedapat-dapatnya. Di lain pihak, lantas kita berhadapan dengan isu-isu global seperti terorisme, dan aneka wujud *mafia* ekonomi. Perkara *tax amnesty* yang bergulir seiring dengan terbongkarnya skandal mondial tentang pengingkaran pajak oleh para konglomerat dalam *Panama Papers* juga masih menyisakan banyak tanda tanya yang perlu diurai dengan baik dan rigor.

\*\*\*

Tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, salah satu Pendiri Negara ini, Sukarno berkata: “Kita hendak mendirikan Negara Indonesia merdeka di atas *Weltanschauung* apa? ... Apakah kita hendak mendirikan Indonesia merdeka untuk seseorang, untuk suatu golongan [Islam atau Kristen atau Hindu atau suku Jawa atau suku Batak]? ... Apakah maksud kita begitu? Sudah tentu tidak! Baik saudara-saudara kaum kebangsaan yang di sini, maupun saudara-saudara yang dinamakan kaum Islam, semuanya telah mufakat bahwa bukan negara yang demikian itulah kita punya tujuan. Kita hendak mendirikan suatu negara ‘semua buat semua’. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan ... Maka yang selalu mendengung di dalam saya punya jiwa ... ialah dasar pertama, yang baik dijadikan dasar buat negara Indonesia, [yaitu] dasar kebangsaan” (M. Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 jilid I*, 68-69).

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam *headline* harian *Kompas* meminta seluruh anak bangsa menyudahi perdebatan penempatan Pancasila sebagai dasar negara RI

(Jumat, 2 Juni 2006). Menurut Presiden Pancasila adalah sumber segala rujukan dan solusi. Selesai.

Benar. Tetapi, justru saat ini, lebih dari periode kapan pun dalam sejarah peradaban bangsa ini, kita tidak boleh mandeg untuk berbicara dan saling mengingatkan akan keberadaan Pancasila.

Bila benar Pancasila adalah solusi dari bangsa ini, bagaimana kita bisa menerima “pembiaran” dari Pemerintah terhadap aneka kiprah kelompok-kelompok peneror kehidupan keseharian bangsa ini atas nama agama dan moralitas dan yang jelas-jelas mengancam kebhinekaan? Tidakkah pemerintah melihat, segala bentuk teror dan ancaman serta umpatan yang dibiarkan jelas memperlihatkan bahwa Pancasila seakan-akan hanyalah *lip service* belaka? Pembangunan rumah ibadat sulit. Doa dan ibadah pun dibuyarkan (dengan aneka alasan sepele) oleh beberapa orang dan tak ada urusan apa pun selanjutnya. Kelompok yang tak segaris diserang. Sebagian lagi diusir. Masjid dan rumah ibadah dirusak. Bahkan diskusi dan seminar pun dibubarkan. Yang memilukan, aneka tokoh ulama dan tokoh masyarakat serta keluarganya seakan menjadi “bulan-bulanan” cercaan dan hinaan secara publik.

Polisi kerepotan menindak perkara ini, sebab tidak ada bukti. Tetapi, pada saat yang sama tidak ada wacana apa pun yang dilontarkan untuk menenteramkan kehidupan. Seakan tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut Penanggungjawab negeri ini yang mengutuk bahwa “teror itu buruk, jelek, jahat!” Hukum seakan tidak ada lagi.

Bila benar bahwa Pancasila adalah rujukan, bagaimana mungkin para pengambil keputusan negeri ini *diam* ketika aneka perda dan perundang-undangan dimaksudkan untuk pelaksanaan hukum-hukum agama? Tidakkah draft pelaksanaan syariat dalam Pancasila sudah dihapus? Tidakkah bila aneka ketentuan wajib dipondasikan pada sumber-sumber agama dan itu diberlakukan secara legal sebagai peraturan pemerintah merupakan *violasi* langsung dari kebenaran bahwa Pancasila adalah satu-satunya sumber dan rujukan kehidupan berbangsa dan bernegara? Tidakkah gejala semacam itu – di mana agama seakan-akan menjadi pembenar segala kemauan dan kewajiban – langsung menohok keanekaragaman bangsa ini?

Bila Pancasila adalah solusi, bagaimana kita bisa memahami “kenylenehan” realitas kebersamaan kita. Keanean makin jelas terlihat ketika demo besar-besaran di hampir segala penjuru dijalankan untuk memprotes Inul (bahkan Gus Dur). Pada saat yang sama, tidaklah demikian besar demo menentang pembatalan perkara Suharto. Suharto jelas melakukan dosa-dosa ketidak-adilan dengan berbagai kebijakannya yang represif selama bertahun-tahun.

Bila benar bahwa Pancasila adalah solusi, semestinya kita tidak terus-menerus “gagap” dengan berbagai kemalangan bencana alam yang mengakrabi bangsa kita. Prinsip keadilan sosial digulirkan hanya sebagai wacana, tapi tidak dalam praktek. Bagaimana mungkin Presiden dan para pengambil keputusan negeri ini memprogandakan keadilan sosial seluruh rakyat selagi pada saat yang sama Suharto dan kroni-kroninya yang meneguk trilyunan hasil dari manipulasi bertahun-tahun dihapuskan dari segala tuntutan hukum?

Kemana kehidupan negara ini bergulir? Seakan-akan, setelah Hatta mencetuskan “negara pengurus”, lantas rejim Orde Baru menggiring negara ini menjadi “negara kekuasaan”, kini masa yang disebut pasca reformasi Indonesia sedang bergulir menjadi “negara preman.”

Negara Preman adalah bentuk lain dari negara tiran. Jika dalam negara tiran, wajib ini atau itu mengalir dari kemauan penguasa; dalam negara preman kewajiban diasalkan dari keinginan dan kehendak kelompok-kelompok pemaksa.

*Realitas* semacam ini jelas-jelas pembelokan terhadap kehidupan bernegara sebagaimana termaktub dalam Konstitusi negara, di mana dalam alinea-alinea Pembuka-nya tidak dijumpai satu pun terminologi “wajib”. Malah, jika disimak dengan teliti (dari terjemahan bahasa Inggris pertama dari Konstitusi 1945), aneka terminologi seperti “free”, “freedom”, “independence”,

“right”, “just”, “justice”, “democracy” dan semacamnya disebutkan lebih dari lima belas kali dalam rangkaian kalimat-kalimat Preambule-nya.

Dalam kerancuan sistem kehidupan sehari-hari, Para pemimpin negeri ini mesti ingat, solusi dadakan yang kerap menyilaukan manusia ialah tampilnya radikalitas agama! Pelajaran dari Iran, Sudan, Palestina, Afganistan dan negara-negara lain, bila kekacauan ekonomi terjadi dan komitmen pemerintah terhadap prinsip keadilan nampak melemah, radikalisme agama dengan mudah akan mengambil alih secara sederhana (dalam cara-cara yang sungguh demokratis!). Dan, tanpa terasa, ideologi bangsa yang menjadi pondasi final eksistensi kehidupan negara dengan mudah akan tergeser oleh ideologi agama. Yang menyusul kemudian: Keragaman akan segera lenyap! Jangan berhenti berbicara menyuarakan Pancasila sebagai ideologi kehidupan berbangsa dan bernegara, sebab fenomena-fenomena aneh yang menandakan deviasinya benar-benar konkret!

\*) Armada Riyanto:

*Pengajar filsafat politik dan ketua STF Widya Sasana, Malang. Email: [fxarmadacm@gmail.com](mailto:fxarmadacm@gmail.com); mencetuskan dan menggarap buku tentang “kearifan lokal Pancasila: Butir-butir filsafat Keindonesiaan” bersama dengan kawan-kawan pengajar filsafat di Indonesia.*

## BIBLIOGRAFI

- Anderson, Benedict and Kahin, Audrey, Eds., *Interpreting Indonesian politics : thirteen contributions to the debate*, Ithaca, N.Y: Cornell Modern Indonesia Project, Southeast Asia Program, Cornell University, 1982.
- Anderson, Benedict R. and Ruth T. McVey, *A preliminary analysis of the October 1, 1965, coup in Indonesia* (with the assistance of Frederick P. Bunnell), Ithaca, N.Y: Modern Indonesia Project, Cornell University, 1971.
- Feith, Herbert, *The Indonesian elections of 1955*, Ithaca, N.Y: Modern Indonesia Project, Southeast Asia Program, Dept. of Far Eastern Studies, Cornell University, 1957.
- \_\_\_\_\_, *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, terjemahan LP3ES, Jakarta: LP3ES, 1988, 184-188.
- Haryanto, Ariel, "Questioning the relevance of national awakening today," *The Jakarta Post*, 21 May 2008.
- Lev, Daniel S., *The transition to guided democracy: Indonesian politics, 1957-1959*, Ithaca, N.Y: Modern Indonesia Project, Southeast Asia Program, Dept. of Asian Studies, Cornell University, 1966.
- Simbolon, Parakriti, *Menjadi Indonesia*, Jakarta: Kompas 2006.
- Soedjatmoko, *An approach to Indonesian history : towards an open future / an address before the Seminar on Indonesian History, Gadjah Mada University, Jogjakarta, Dec. 14, 1957*, Ithaca, N.Y: Modern Indonesian Project, Southeast Asia Program, Dept. of Far Eastern Studies, Cornell University, 1960.
- Thung, Yvonne, *A guide to Indonesian serials, 1945-1965*, Ithaca, New York: Cornell University Library, 1966.